



SKKNI dan Sertifikasi General Banking

Agus Martowardojo, Ketua IBI



- Lebih Akrab, Lebih Hangat dengan Website Baru
- Fenomena Pemilu, Peluang Dunia Usaha
- Redefinisi API Pascakrisis

Bank Mandiri The Best Bank in Indonesia

2008 & 2009

Awarded by EUROMONEY Magazine



mandiri call 14000
atau (021) 5299-7777

Terdepan, Terpercaya. Tumbuh bersama Anda.

Berkat keunggulan dalam kemampuan kompetisi, kinerja pengembangan bisnis dan landasan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), Bank Mandiri meraih penghargaan bergengsi: **Euromoney Awards for Excellence** sebagai **The Best Bank in Indonesia 2009**. Dedikasi tinggi dan budaya kerja keras karyawan didukung kepercayaan nasabah berhasil menembus prestasi internasional, seiring langkah kami menembus batas menjadi *Regional Champion Bank*.

General Banking

▶▶ ZAMAN yang terus bergerak maju pada gilirannya melahirkan dinamika baru yang harus disikapi secara arif dan bijaksana. Sebagai bagian dari perputaran zaman yang makin modern, industri perbankan merasakan hal yang sama. Kebutuhan untuk memperbaiki sekaligus mematuhi diri telah menjadi tuntutan global yang terus bergulir mengisi ruang dan waktu sampai dengan detik ini.

Adalah spesialisasi dan kompetensi. Dua kata yang hari-hari belakangan semakin bermakna di tengah hiruk-pikuk perjalanan bisnis perbankan di republik ini. Praktikanya, dua kata itu menjadi kebutuhan yang baku untuk merekonstruksi sumber daya manusia (SDM) perbankan agar lebih andal dan responsif menjawab perubahan zaman.

Dalam kehidupan nyata, spirit itu senantiasa dipupuk dan dibina Ikatan Bankir Indonesia (IBI). Dari hari ke hari, asosiasi profesi bankir tersebut terus mencari dan memantapkan bentuk-bentuk pengembangan SDM perbankan sesuai dengan kebutuhan industri yang makin kompleks dan *sophisticated*.

Setelah menelurkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) untuk bidang *risk management*, *auditor*, *treasury dealer*, dan *wealth management*, IBI sukses melahirkan SKKNI bidang *general banking*. Belum lama, SKKNI bidang *general banking* memperoleh persetujuan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). Bankir kini tinggal menunggu tanggal main uji sertifikasi di bidang tersebut.

Sekadar informasi, *general banking* merupakan bidang pekerjaan di perbankan yang domainnya berada di luar bidang spesialis seperti halnya *treasury*, *wealth management*, *risk management*, atau *auditor*. *General banking* mencakup bidang kerja, di antaranya *supporting*, *services*, SDM, dan teknologi informasi (TI).

I. Supomo, Ketua Pengarah Kelompok Kerja Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKN) Sektor Keuangan Bidang *General Banking*, mengungkapkan, ada dua hal yang menjadi pertimbangan penting IBI dalam merumuskan SKKNI *general banking*. Satu, bidang kerja *general banking* masih berkaitan satu sama lain. Bankir-bankir yang ada di wilayah ini memungkinkan untuk berpindah dari satu jalur ke jalur lainnya. Dua, jumlah bankir yang termasuk dalam bidang *general banking* di sebuah bank umumnya lebih banyak ketimbang bankir yang bekerja di bidang spesialis.

Semangat SKKNI bidang *general banking* sejatinya untuk memotivasi bankir yang berkarier di bidang itu agar memiliki keahlian khusus (spesialisasi dan kompetensi), kendati bersifat umum dan lebih luas. Kabarnya, uji sertifikasi bidang *general banking* hanya terdiri atas tiga tingkatan. Tingkat satu untuk bankir pemula, tingkat dua untuk kepala bagian, dan tingkat tiga untuk kepala wilayah. Menurut jadwal, sertifikasi *general banking*, yang pelaksanaannya ditangani Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), bakal digelar paling lambat pada 2009. Yang jelas, materi ujiannya mengacu pada konsep Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Tidak hanya pengetahuan bidang perbankan, materi-materi seputar *attitude* dan *skill* juga diujikan. Ke depan, IBI berharap spirit untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian ini mendapat tempat di hati segenap bankir Tanah Air. Semoga gayung bersambut. □

Penerbit: Ikatan Bankir Indonesia (IBI), **Pelindung:** Agus Martowardojo, **Pemimpin Redaksi:** Winny E. Hassan, **Anggota Redaksi:** Sukatmo Padmosukarso, Farid Rahman, Gus Irawan Pasaribu, Roosniati Salihin, Iqbal Latanro, Gayatri Rawit Angreni, **Sirkulasi dan Iklan:** Martono Soeprapto, **Konsultan:** PT Infoarta Pratama, **Alamat Redaksi dan Iklan:** Mandiri Tower Lantai 9, Bapindo Plaza, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190 **Telepon:** (021) 5267306, 5267375, **Faksimile:** (021) 5278690. **Website:** www.ikatanbankir.com **E-mail:** sekretariat@ikatanbankir.com

Redaksi menerima tulisan dari anggota Ikatan Bankir Indonesia (IBI). Panjang setiap tulisan 3.000-7.500 karakter.

▼ Dari Redaksi

GENERAL BANKING 1

▼ Liputan Utama

MENGASAH KOMPLEKSITAS KOMPETENSI MELALUI SERTIFIKASI 4

Tak ada rujukan yang pasti tentang *general banking*. Lingkupnya yang sangat luas membutuhkan SDM yang memiliki kompleksitas kompetensi. Untuk itu, sertifikasi pun digelar.

PROGRAM SERTIFIKASI BANKIR UMUM 6

▼ Profil

GATOT SUWONDO, MEREALISASI API, MENATA INDUSTRI PERBANKAN 8

Fondasi ekonomi Indonesia mulai kokoh. Belajar dari masa lalu, perbankan Indonesia tak lagi merasakan dampak signifikan dari krisis finansial yang terjadi, meski sempat mengalami guncangan likuiditas.

Tarif Iklan

- Cover II: Rp6 juta
- Cover III: Rp8 juta
- Cover IV: Rp10 juta
- Iklan 1 halaman dalam berwarna Rp5 juta.
- Iklan 1 halaman dalam hitam putih Rp4 juta.
- Iklan ½ halaman dalam berwarna Rp3 juta.
- Iklan ½ halaman dalam hitam putih Rp2,5 juta.
- Iklan pariwisata/advertorial ditambah biaya produksi sebesar 25% dari harga iklan yang dipilih pemasang iklan
- Harga belum termasuk pajak
- Pemasang iklan dapat menghubungi Maisari (0812 848 6093) atau Kyosi Sancaya (0812 9975 015)



▼ Info IBI

GATHERING IBI 2009 MENENTUKAN ARAH SETELAH PILPRES 10

BARA SELENGGARAKAN SEMINAR DAN PELATIHAN MANAJEMEN RISIKO 11

SEPAKAT TURUNKAN SUKU BUNGA 12

▼ Lensa

MEMBER GATHERING PASCA-PILPRES 2009 13

SEMINAR DAN PELATIHAN RISK MANAGEMENT 14

BUKA PUASA BERSAMA IBI 15

▼ Opini

FENOMENA PEMILU, PELUANG BAGI DUNIA USAHA 16

▼ Zona

LEBIH AKRAB, LEBIH HANGAT DENGAN WEBSITE BARU 18

IBI telah memperbarui *website*-nya, dari www.bankir-indonesia.org menjadi ikatanbankir.com. Apa saja yang baru dari *website* yang diluncurkan Agustus lalu itu?

▼ Tingkap 20

▼ Opini

REDEFINISI API PASCAKRISIS 22

Krisis moneter yang terjadi pada 1997-1998, meluluh-lantakkan banyak hal. Perbankan nasional baru saja melewati masa pemulihan. Aset perbankan dilimpahkan kepada BPPN dan LDR perbankan berada di bawah 40%.

▼ Tajuk

KEMERDEKAAN DAN SEMANGAT MEMBANGUN BANGSA 24



Majalah *Media Bankir* ini disponsori oleh



BANK  DKI

KPR GriyaMonas TabunganMonas



**Punya orang Jakarta,
pasti untuk Jakarta!**

Bank DKI
Call Center

2354 5555



AYO ke **BANK** jakcard

ATM
BERGAMA

BPO
DET
online

**WESTERN
UNION**

www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com

Mengasah Kompleksitas Kompetensi Melalui Sertifikasi

Tak ada rujukan yang pasti tentang *general banking*. Lingkupnya yang sangat luas membutuhkan SDM yang memiliki kompleksitas kompetensi. Untuk itu, sertifikasi pun digelar. Tonthowi Jauhari



Kantor cabang sebuah bank; butuh keterampilan general banking

▶▶ SEJATINYA, tak ada rujukan pasti tentang definisi *general banking*. Istilah tersebut muncul seiring dengan perkembangan transaksi di industri perbankan. Transaksi perbankan yang masih sederhana membuat praktisi perbankan harus mampu menjalankan banyak fungsi atau bidang kerja di sektor tersebut. Ketika itu, profesi bankir masih *pure general* alias belum ada spesialisasi keahlian khusus.

Seiring dengan perkembangan transaksi perbankan yang makin kompleks, baik jumlah maupun jenis transaksi, bank membutuhkan tenaga andal yang terspesialisasi. Beberapa bidang kerja harus diisi oleh sumber daya manusia (SDM) yang secara profesional dan

mendalam mampu menguasai bidang kerja tersebut. Tujuannya, supaya mampu bersaing dan memberikan layanan terbaik. Sejak itu, spesialisasi bidang kerja di perbankan mulai diterapkan.

Awalnya, *treasury* dan *wealth management* yang terlebih dulu mengalami pergeseran ke arah tersebut. Sebab, dua bidang ini paling membutuhkan kompetensi khusus dari SDM-nya. Tidak heran jika dalam perjalanannya, *treasury* dan *wealth management* lebih maju. Asosiasi profesi bidang ini pun sudah terbentuk. Bahkan, mekanisme kontrol kompetensi bagi anggota asosiasi sudah dijalankan. Dibandingkan dengan bidang kerja yang lain, serangkaian sertifikasi kompetensi

untuk *treasury* serta *wealth management* sudah lebih dulu ada.

Di tengah kondisi perbankan yang kian kompleks, spesialisasi bidang kerja di bank terus mengalami perkembangan.

Baik bidang kerja teknologi informasi (TI), audit, manajemen risiko, maupun beberapa bidang kerja lain membutuhkan tenaga ahli yang terspesialisasi. Kini, sudah banyak bank yang kokoh karena dukungan tenaga ahli dengan spesialisasi di bidang-bidang kerja yang tersedia.

Kendati begitu, bukan berarti lingkup tugas bidang kerja yang dulu disebut *pure banking* lantas berkurang karena beberapa bidang sudah terspesialisasi. Sebaliknya, kompleksitas perbankan membuat bidang kerja *pure banking* makin membutuhkan konsentrasi tinggi. Meski sudah ada yang menangani bidang lain, bankir yang ada di wilayah itu tetap harus memahami berbagai bidang, termasuk yang sudah terspesialisasi. Intinya, mereka

harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang sangat luas menyangkut kegiatan operasional bank. Tidak hanya dari segi *core business*-nya, tapi juga pemahaman akan bidang kerja *supporting*.

Bankir di bidang *pure banking* memang memiliki tanggung jawab yang berat. Bagaimana tidak, meski hanya seorang *account officer*, minimal, dia memahami TI yang digunakan banknya. Dia juga harus mengetahui manajemen risiko, *treasury*, *wealth management*, dan berbagai bidang lain. Dan, sudah pasti, dia harus memahami tugas dan tanggung jawab utamanya sebagai *account officer* secara mendalam.

Karena ruang lingkungannya yang begitu



Pelatihan SDM bank; sebaiknya punya sertifikasi general banking

luas, tidak heran jika posisi *general banking* cukup diperhitungkan di industri perbankan. Apalagi, mereka memiliki jenjang karier yang lebih dinamis, misalnya sebagai kepala cabang ataupun kepala wilayah. Tentunya, pencapaian itu harus dibarengi dengan tingkat kompetensi yang mumpuni. Sementara, kesempatan semacam itu nyaris tidak dimiliki bankir spesialis karena spesialisasi hanya dibutuhkan di kantor pusat.

Bertolak dari kondisi ini, Ikatan Bankir Indonesia (IBI) merasa perlu memberikan bekal yang cukup kepada SDM perbankan di posisi itu. Salah satu upayanya, dengan menggelar sertifikasi kompetensi *general banking* yang terdiri atas tiga tingkatan. Cakupan materi yang diujikan pun sangat luas, tapi semua bermuara pada kompetensi, *skill*, serta *attitude* yang dimiliki *general banker*.

Ke depan, semua orang yang mulai berkarier di industri perbankan harus mengikuti uji sertifikasi *general banking* tingkat satu. Sebab, sertifikasi ini boleh dibilang pintu masuk bagi siapa pun yang ingin menjadi bankir. Kendati demikian, sertifikasi *general banking* bukanlah harga mati bagi bankir-bankir pemula. Bankir yang lulus *officer development program* (ODP) tidak perlu lagi mengikuti sertifikasi *general banking*. Pasalnya, program yang biasanya diselenggarakan bank sebagai materi pembekalan awal bagi bankir muda ini sama bobotnya dengan sertifikasi *general banking*.

Rupanya, niat baik IBI ini malah memicu pro kontra. Banyak bankir yang kurang sepekat dengan gagasan itu. Iwan Isdawarman, *Corporate Communication* Bank Central Asia (BCA), menilai sertifi-

kasi *general banking* justru tidak efisien. Konseptual dan lingkup kerja *general banking* sangat luas, tapi pada praktiknya, bank memiliki aturan yang harus dipatuhi tiap SDM. Aturan inilah yang semestinya diperkuat, sehingga kompetensi bankir makin terasah.



Kegiatan divisi corporate communication; bagian general banking

Menurut Iwan, gagasan sertifikasi *general banking* ini tidak jauh berbeda dari sertifikasi profesi dokter. Dokter spesialis dan dokter umum wajib ikut sertifikasi karena pekerjaan mereka menyangkut makhluk hidup. Sertifikasi pun dilakukan untuk memastikan dokter-dokter itu sudah bekerja sesuai dengan prosedur, sehingga mampu menjaga kehidupan pasiennya.

Kondisi dunia kedokteran tidak bisa disamakan dengan industri. Karena, setiap industri pasti memiliki risiko. Risiko bisa diantisipasi dengan memperkuat

infrastruktur "*role of model*" di perusahaan tersebut. "Jadi, tidak lantas semua bidang harus disertifikasi," tegas Iwan.

Kalau hal itu dipaksakan, akan memengaruhi perkembangan industri perbankan. Tidak tertutup kemungkinan perkembangan perbankan lebih lambat dari target yang ditetapkan setiap bank. "Tiap bank punya target ekspansi dengan membuka cabang. Semua SDM di cabang '*kan general banker*. Kalau semua harus mengikuti sertifikasi lebih dulu, berapa lama waktu yang dihabiskan, sementara cabang belum bisa beroperasi. Selain itu, *cost*-nya pasti akan meningkat," papar Iwan mendetail.

Pendapat Iwan boleh jadi benar. Hal senada juga diungkapkan praktisi perbankan lain yang enggan disebut namanya. Dia mempertanyakan seberapa pentingnya *general banker* harus mengikuti sertifikasi. Tanpa maksud mengesampingkan, fungsi SDM di kelompok ini bukan kunci dalam menentukan keuntungan dan kerugian perusahaan. Jadi, rasanya cukup dengan memperkuat aturan main di bank tersebut atau menerapkan *Good Corporate*

Governance (GCG) secara kontinu.

Praktisi perbankan itu juga menambakan, sertifikasi kompetensi sangat dibutuhkan bankir spesialis, terlebih mereka yang berkecimpung di divisi *treasury*. Sebab, jika divisi ini mengalami *lost*, bank langsung merasakan dampaknya. "Orang-orang di divisi inilah yang sebetulnya sangat membutuhkan sertifikasi. Karena selain *skill*, perusahaan mesti bisa mengetahui moral atau *attitude*-nya. Begitu dia (*treasury*) *lost*, perusahaan saat itu juga menanggung dampak kerugiannya," tegasnya. ■

Program Sertifikasi Bankir Umum

Bila Anda bekerja di divisi SDM, TI, atau bidang-bidang *general banking* di sebuah bank, tak usah gusar. Berbekal standar kompetensi yang disusun IBI, Anda bisa mengukir karier dengan standar kompetensi yang setara dengan bankir spesialis bidang lainnya. Ninuk Saskiawardani



Mengelola *automatic teller machine (ATM)*; penguasaan TI

►► KOMPETENSI sudah menjadi syarat mutlak yang mesti dimiliki bila seseorang ingin berkarier di industri perbankan. Syarat ini tidak hanya berlaku bagi pelaku bisnis perbankan dengan keahlian khusus, seperti *treasury* atau *wealth management*. Mereka yang bergerak di bidang *general banking* pun dituntut memiliki kompetensi yang tinggi.

Menyikapi tuntutan itu, Ikatan Bankir Indonesia (IBI) telah menyusun standar kompetensi bidang *general banking*. Meski istilah *general banking* sudah sering didengarkan di kalangan IBI, tak menutup kemungkinan, pelaku industri perbankan belum mengenal betul bidang-bidang yang termasuk dalam wilayah ini.

Untuk memberikan gambaran lengkap tentang bidang *general banking*, suatu sore di awal Agustus 2009, I. Supomo, Ketua Bidang Pengembangan dan Pembinaan Profesi IBI yang juga Ketua Pengarah Kelompok Kerja Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia (RSKNI) Sektor Keuangan Bidang General Banking, berkenan meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan *MediaBankir* di Kantor Pusat IBI, Jakarta. Tiga puluh menit sebelum menghadiri rapat pengurus IBI, I. Supomo secara gamblang bercerita tentang latar belakang lahirnya konsep *general banking* hingga harapan IBI terhadap pelaku bisnis perbankan di Indonesia. Petikannya:

Bagaimana perkembangan terakhir penyusunan standar kompetensi profesi yang dilakukan IBI?

IBI berencana membuat standar kompetensi delapan bidang profesi di industri perbankan. Kedelapan bidang profesi itu adalah bidang *risk management*, *internal audit*, *treasury dealer*, *wealth management*, *operations*, *credit*, *funding and services*, dan *general banking*. Empat dari delapan bidang ini, yakni *risk management*, *internal audit*, *treasury*

dealer, dan *wealth management*, sudah memiliki standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI). Sedangkan, bidang *general banking*, SKKNI-nya baru saja mendapat persetujuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). Tinggal menunggu proses formalnya. Diharapkan, bidang *credit*, *operations*, dan *funding and services* akan menyusul.

Seberapa pentingkah spesialisasi profesi di industri perbankan?

Di industri perbankan, tingkat spesialisasi belum terlalu jauh (sempurna) seperti bidang pekerjaan lainnya. Bidang kedokteran, misalnya. Spesialisasinya sudah lebih jauh, sehingga tidak memungkinkan orang dengan spesialisasi tertentu pindah ke bidang spesialisasi lainnya. Di industri perbankan, masih memungkinkan untuk pindah.

Mengapa IBI menetapkan standar kompetensi untuk delapan bidang profesi tersebut dan bagaimana posisi *general banking* di industri perbankan?

Awalnya, pekerjaan di bank sifatnya generalis. Semua orang yang bekerja di industri perbankan harus menguasai berbagai bidang yang ada di sektor ini. Saat itu, transaksi belum terlalu banyak, baik dari segi jenis maupun jumlah transaksi. Masalah pun belum sekompleks sekarang. Seiring dengan berjalannya waktu dan tuntutan nasabah, pelaku di bisnis perbankan tidak bisa menguasai semua masalah dan memberikan layanan yang baik. Karena itu, untuk mengatasi beragamnya, jumlah, kompleksitas transaksi, serta supaya bisa bersaing, dibutuhkan tenaga-tenaga yang mempunyai kompetensi tinggi untuk bidang-bidang tertentu. Muncullah kemudian spesialisasi.

Jadi, kalau dulu profesi bankir *pure generalis*, belakangan ada profesi tertentu yang dituntut spesialisasinya. Mereka

dituntut menguasai secara profesional dan mendalam bidang keahlian tertentu supaya bisa bersaing dan memberikan layanan lebih baik.

Spesialisasi seperti *treasury* dan *wealth management* dikenal lebih dulu. Asosiasi yang tujuannya meningkatkan kompetensi anggotanya di bidang spesialisasi itu pun lebih dulu ada. IBI mulai membuat standar kompetensi bidang-bidang yang sudah ada tingkat spesialisasinya. Bankir yang menjadi anggota asosiasi profesi dengan spesialisasi ini pun sudah mulai mengikuti program peningkatan kompetensi.

Lalu, apakah tidak ada bidang-bidang generalis seperti dulu? Sisa dari bidang-bidang spesialis itu kami cakup sebagai generalis. Artinya, bankir dari kelompok ini masih bisa pindah-pindah ke luar bidang pekerjaannya. Di luar bidang yang sudah dibuat standar kompetensinya, kami tampung dalam *general banking*.

Apa pertimbangan IBI dalam menyusun standar kompetensi bidang *general banking*?

Ada dua pertimbangan IBI membuat SKKNI bidang *general banking* ini. Satu, bidang-bidang *general banking* masih berkaitan satu sama lain, sehingga memungkinkan pindah dari satu jalur ke jalur lainnya sepanjang masih di bidang *general banking*. Dua, jumlah orang yang termasuk dalam bidang *general banking* di satu bank lebih besar dibandingkan dengan bidang lainnya. Mereka juga bergerak di bidang yang lebih luas, seperti bidang *support*, layanan, sumber daya manusia (SDM), dan teknologi informasi (TI).

Kami buat SKKNI-nya supaya orang yang bergerak di bidang ini memiliki keahlian tertentu, walau keahlian ini sifatnya lebih umum karena mencakup berbagai bidang pekerjaan. Keahlian yang disyaratkan dalam SKKNI juga lebih umum dan lebih luas. Tapi, dari segi tingkatannya, tidak terlalu banyak. Uji sertifikasi bidang *general banking* ini hanya tiga tingkatan. Tingkat satu untuk level pemula, tingkat dua untuk kepala bagian, dan tingkat tiga untuk kepala wilayah dan kepala divisi. Di atas itu, ada program *refreshment* untuk Senior Executive Bankers.

Bagaimana proses penyusunan SKKNI bidang *general banking*?

Awalnya IBI membentuk kelompok kerja (pokja) untuk membuat rancangan SKKNI. Pokja terdiri atas anggota asosiasi profesi. Karena bidang *general banking* belum/tidak ada asosiasinya yang khusus, penyusunan rancangan SKKNI



ditangani langsung oleh IBI. Penyusunan rancangan SKKNI ini mengacu pada SKKNI Depnakertrans. Selanjutnya, rancangan SKKNI ini diajukan ke Depnakertrans dengan rekomendasi institusi terkait. Karena SKKNI ini untuk industri perbankan, Bank Indonesia (BI)-lah yang merekomendasikan.

Setelah SKKNI-nya mendapat persetujuan Depnakertrans, bagaimana dan kapan uji sertifikasi bidang *general banking* dilaksanakan?

Sertifikasi bidang *general banking* tidak dilakukan IBI, tapi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP). LSPP pun menyelenggarakan sertifikasi untuk bidang profesi lainnya. Sertifikasi bidang *general banking* diharapkan sudah dapat dilaksanakan tahun ini.

Pola uji yang dilakukan LSPP mengacu pada konsep Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Selain pengetahuan, dalam uji sertifikasi bidang *general banking* ini juga diujikan *attitude* dan *skill*. *Training-training* bidang *general banking* pun sudah ada. Saat ini, uji sertifikasi bidang *general banking* masih diprioritaskan bagi karyawan bank.

Dengan adanya standar kompetensi bidang *general banking*, apa harapan IBI terhadap bankir?

IBI berharap, semua orang yang mulai berkarier di industri perbankan mengambil uji sertifikasi *general banking* tingkat satu karena sifatnya umum. Seperti profesi dokter, awalnya mereka mengambil program dokter umum. Kalau mau meningkat menjadi dokter spesialis, (baru) mengambil program spesialisasi. Jadi, konsepnya, orang yang baru bekerja di

bank, mulai dari staf, mengikuti uji sertifikasi bidang *general banking* ini.

Lulusan program *officer development program (ODP)* pun disamakan dengan sertifikasi bidang *general banking* tingkat satu. Selanjutnya, kalau mereka ingin berkarier di bidang *treasury*, (mereka perlu) mengambil sertifikasi bidang *treasury*. Demikian juga untuk bidang *risk management* dan bidang lainnya.

Kalau ingin tetap (berkarier) di bidang *general banking*, misalnya ingin menjadi kepala wilayah atau pindah dari satu kantor cabang ke kantor cabang lainnya atau pindah ke kantor pusat, jalurnya ada di *general banking*. Kalau bidang *treasury* 'kan hanya ada di kantor pusat. Jadi, konsepnya, semua orang yang bekerja di bank boleh mengambil sertifikasi sesuai dengan jalur karier yang diinginkan. Tentunya yang paling berkepentingan disamping yang bersangkutan sendiri, juga bank atau industri dimana tenaga/bankir tersebut bekerja. Oleh karena itu, dukungan dan dorongan agar para pegawai bank mengambil program sertifikasi, diharapkan juga datang dari bank yang bersangkutan.

Apakah program peningkatan kompetensi IBI hanya terbatas pada Sertifikasi?

Tidak juga. Program sertifikasi hanyalah kompetensi standar. Upaya pengembangan diri harus terus dilakukan. IBI juga mempunyai program-program untuk ini, berupa seminar atau *training*, agar para bankir yang sudah mengambil program sertifikasi dapat selalu mengembangkan diri mengikuti tuntutan dan perkembangan yang ada. ■



Gatot Suwondo, Direktur Utama BNI

Merealisasi API,

Menata Industri Perbankan

Fondasi ekonomi Indonesia mulai kokoh. Belajar dari masa lalu, perbankan Indonesia tak lagi merasakan dampak signifikan dari krisis finansial yang terjadi, meski sempat mengalami guncangan likuiditas. Tonthowi Jauhari

▶▶ EKONOMI Indonesia mulai tertata. Tak seperti beberapa tahun silam, isu politik dan teror yang sempat muncul tak berdampak signifikan pada perekonomian Indonesia. Pemahaman pasar yang cukup mendalam terhadap Indonesia membuat investor yakin bahwa potensi ekonomi Indonesia masih baik.

Demikian pula dengan industri perbankan. Belajar dari krisis 11 tahun silam, perbankan mampu meredam dampak krisis finansial global yang terjadi setahun lalu. Memang, industri perbankan sempat mengalami syok karena likuiditas minim. Namun, hal itu bisa segera diatasi

dengan baik. Industri perbankan mulai kembali tumbuh. Demikian tutur Gatot M. Suwondo, Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI). Inilah petikan bincang-bincang *MediaBankir* dengannya.

Teror kembali muncul akhir-akhir ini. Bagaimana kondisi ekonomi Indonesia?

Tak banyak berpengaruh. Investor masih *confident* dengan Indonesia. Meskipun ada sedikit *trouble*, mereka sudah paham dengan Indonesia, sehingga mereka berkeyakinan Indonesia masih memiliki potensi yang sangat besar.

Sekarang malah banyak investor masuk ke pasar modal Indonesia. Ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa potensi pasar Indonesia tetap stabil, meski beberapa isu yang tidak menyenangkan terjadi akhir-akhir ini, seperti bom Kuningan dan teroris.

Beberapa tahun lalu, ekonomi Indonesia masih sensitif terhadap isu-isu politik. Akhir-akhir ini, hal tersebut tidak terjadi. Apa penyebabnya?

Saya melihat, empat tahun terakhir perekonomian kita sudah mulai membaik dan sudah menemukan arahnya. Di perbankan, konsolidasi perbankan sudah mulai menunjukkan perbaikan setelah krisis. Kita banyak belajar dari krisis 1998. Dari situ, saat terjadi krisis 2007 kita sudah memiliki kemampuan untuk mengatasinya, sehingga kondisinya lebih terkendali.

Terbukti, dampak krisis tidak begitu memengaruhi perbankan. Perbankan

memang sempat mengalami kesulitan likuiditas. Namun, hal tersebut bisa diatasi. Beberapa bank memang mengalami masalah agak serius. Tapi, masalah tersebut tidak berlangsung secara sistemis seperti pada saat krisis 1998.

Kredit mengalami penurunan. Apa faktor penyebabnya?

Masalah kredit sangat terkait dengan tingkat suku bunga. Tapi, yang paling menentukan adalah masalah *supply and demand*. Ketika suku bunga tinggi, *demand* kredit menjadi kurang. Di sisi lain, masih ada bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Bank ini mau tidak mau mesti memperhitungkan penyaluran kreditnya atau mengerem ekspansinya agar dia tidak mengalami *mismatch*. Otomatis, ini membuat penyaluran kredit menjadi kurang.

Kalau BI (Bank Indonesia) mengatakan likuiditas nasional cukup, memang betul cukup. Tapi, di Indonesia 'kan ada 125 bank yang berkompetisi untuk itu. Bisa jadi, kecukupan likuiditas ini tidak terdistribusi merata ke semua bank. Dengan demikian, kita menemukan masih ada beberapa bank yang mengalami kesulitan likuiditas.

Soal API (Arsitektur Perbankan Indonesia) yang pada 2004 di-*launch*, sebenarnya itu konsepsi yang sangat bagus. API akan membuat industri lebih sehat. Bank yang kecil-kecil diharapkan merger, sehingga kondisi mereka bisa lebih baik.

Sayangnya, konsep bagus tersebut tidak didukung insentif yang memadai. Jika API bisa terealisasi dengan baik, industri perbankan bisa lebih sehat. Sebab, kalau kita lihat negara kita, apa perlu jumlah bank yang sedemikian banyak. Sebenarnya, yang penting itu 'kan bukan jumlah banknya, melainkan jumlah kantor cabang bank yang bisa menembus berbagai daerah hingga pelosok. Dengan demikian, *accessibility* masyarakat yang menggunakan jasa perbankan bisa lebih bagus.

Membengkaknya jumlah bank tak lepas dari munculnya Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Bagaimana cara memperkecil jumlahnya, mengingat API pun belum bisa berjalan optimal?

Ide munculnya Pakto 88 sebenarnya bagus. Dengan makin banyaknya jumlah bank pada saat itu, ekonomi bisa berjalan lebih cepat. Tapi, tentu, sebuah kebijakan memunculkan dampak. Masalahnya,

kebijakan Pakto tidak diiringi dengan kebijakan lain, seperti SDM (sumber daya manusia).

Begitu Pakto 88 diluncurkan, orang dengan mudah mendirikan bank. Hanya dengan uang Rp10 miliar orang bisa buka bank lebih dari satu. Tapi, ini tidak dibarengi dengan kesiapan SDM. Mengelola bank itu 'kan tidak mudah dan sangat berbeda dengan mengelola pabrik. Akhirnya, banyak bank yang mengalami masalah karena memang tidak dikelola SDM yang bagus.

Untuk mengembalikan industri perbankan yang bagus dengan jumlah bank yang tidak terlalu banyak, API sebenarnya merupakan konsep yang bagus. Cuma, kembali lagi, BI mesti memikirkan insentif bagi bank yang mau merger, sehingga konsep API bisa berjalan dan industri perbankan lebih sehat.

Sebenarnya, berapa jumlah bank yang ideal untuk ekonomi Indonesia?

Kalau saya dengar saat BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dulu, jumlah bank yang ideal itu sekitar 40-50 bank. Itu perkiraan dulu. Cuma, cabangnya yang diperbanyak. Bahkan, kalau bisa, sampai ke daerah-daerah. Saat ini, ada 125 bank. Ini cukup besar untuk ekonomi Indonesia.

Sementara, kalau kita bicara efisiensi, dengan jumlah bank yang sedemikian besar, kita jadi kurang efisien. Di sisi lain, kurangnya efisiensi ini terjadi karena masyarakat yang kami *service* juga belum *sophisticated*.

Kalau kita lihat hasil survei, untuk bertransaksi di cabang dibandingkan dengan elektronik bedanya jauh. Kalau melalui cabang, *cost*-nya sekitar US\$1,2 per transaksi. Tapi, kalau melalui *electronic channel*, seperti ATM (*automatic teller machine*), itu bisa sampai US\$60 sen. Bahkan, kalau *e-banking*, bisa sampai US\$20 sen. Makanya, semua bank mengarah ke sana.

Kendalanya, banyak hal yang harus diperbaiki. Pertama, infrastruktur teknologi informasi (TI) kita harus dilihat sejauh mana mampu menyerap semua. Yang paling perlu ditingkatkan adalah edukasi masyarakat terhadap teknologi untuk

transaksi perbankan.

Kita harus melihat secara detail, apakah masyarakat kita sudah *aware* terhadap teknologi untuk transaksi perbankan. Sebab, kalau kita bicara *e-banking*, cabang di daerah belum banyak yang menerima transaksi dengan *channel* ini. Masyarakat di daerah masih banyak yang menggunakan transaksi di *outlet*. Kalaupun *electronic channel*, masih sebatas ATM.



Soal sertifikasi manajemen risiko, bagaimana pendapat Anda mengenai seruan Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) yang tidak akan mengirimkan SDM ke program sertifikasi yang digelar Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)?

Kita menyadari, *risk management* memang perlu. Hanya, perlu dilihat secara lebih kompleks. Jangan sampai sertifikasi itu menjadi kewajiban setiap dua tahun sekali. Katanya untuk penyegaran. Nah, itu 'kan membuat kita bertanya, kenapa mesti dua tahun sekali. Itu semua 'kan *cost* yang tentunya tidak sedikit.

Mungkin orang bisa berasumsi, biaya tersebut bisa di-*switch* dari biaya SDM yang ada di *budget* bank. Tapi, itu tidak bisa dilakukan karena biayanya jauh lebih besar. Kami mesti berhitung, terutama untuk bank besar, berapa banyak orang yang harus mereka kirim. *Cost* yang harus dikeluarkan berlipat ganda dari biaya SDM yang dimiliki bank tersebut.

Tidak salah kalau kemudian bank berpikir lebih baik diberi *training* sendiri. *Toh*, tidak ada jaminan orang yang sudah bersertifikat manajemen risiko dari BSMR terus menjadi andal. ■

Gathering IBI 2009

Menentukan Arah Setelah Pilpres

Pesta demokrasi rakyat Indonesia baru saja usai. Setelah para politikus, kini, giliran bankir menentukan arah langkah mereka.



►► PENGHUJUNG Juli 2009, Ikatan Bankir Indonesia (IBI) kembali menggelar *member gathering*. Kali ini, Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Jakarta tampil sebagai tuan rumah dan berkenan menjamu rekan-rekan bankir. Bertempat di lantai 25, *gathering* yang dimulai pukul 12.00 ini diawali dengan makan siang bersama. Setelah itu, di tengah suasana yang hangat, mereka membahas tema "Perekonomian Indonesia Pascapilpres 2009".

Acara yang dihadiri sekitar 100 bankir itu makin semarak saat suara merdu seorang biduanita mengiringi jalannya makan siang. Tepat pukul 13.00, acara dimulai dengan sambutan Agus Martowardojo selaku Ketua IBI yang juga menjabat Direktur Utama Bank Mandiri. Dalam sambutannya, Agus memaparkan

beberapa kinerja IBI sebagai wadah dari para bankir selama 2009.

Menurut Agus, sejauh ini, IBI telah menyusun standar kerja kompetensi nasional Indonesia (SKKNI) di bidang *general banking*, *wealth management*, *internal audit*, *treasury dealer*, dan *risk management*. Dari kelima bidang tadi, ada satu bidang yang belum memperoleh SKKNI, yaitu *general banking*. Namun demikian, bidang ini sudah mendapatkan persetujuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. "Dalam waktu dekat, IBI akan segera membuat uji materi kompetensi dan asesor, agar uji sertifikasi dapat dilaksanakan secepatnya," ungkap Agus berjanji.

Terkait dengan uji sertifikasi, Agus juga menyampaikan sikap IBI terhadap Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor

11/19/PBI/2009 yang disahkan Juni lalu. IBI menilai dalam PBI yang sudah dua kali mengalami penyempurnaan itu masih ada beberapa hal yang kurang tepat. Antara lain, mengenai materi yang diujikan oleh suatu lembaga uji sertifikasi yang selama ini menangani ujian sertifikasi profesi bankir. "Selama ini, yang diuji 'kan hanya *knowledge*-nya, padahal *attitude* juga perlu. Kondisi lapangan antara bankir yang ada di Jakarta dan Papua itu berbeda," jelasnya.

Seusai sambutan, giliran sekapur sirih dari tuan rumah, Gatot M. Suwondo, Direktur Utama BNI 46. Dalam kesempatan itu, Gatot memperkenalkan orang-orang yang berada di jajaran Komisaris dan Direktur BNI 46. Tak lama kemudian, acara utama dimulai dengan pemaparan tentang pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden yang disampaikan Eep Saefullah Fattah, pengamat politik muda yang analisisnya terkenal tajam.

Menurut Eep, warna politik di Indonesia tidak kuat, sehingga polarisasi tidak bisa ditentukan. Terbukti, partai yang memiliki ideologi berbeda pun dapat berkoalisi mengusung calon yang sama dalam pemilu. Meski begitu, Eep tetap optimistis dengan terpilihnya pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono sebagai presiden dan wakil presiden periode 2009-2014, kondisi pemerintahan akan lebih kondusif. "Karena hanya presiden yang berasal dari partai, maka berbagai kepentingan politik yang dapat menimbulkan konflik dapat diminimalisasi," paparnya.

Kendati ulasan Eep terbilang berat, antusiasme peserta tidak lantas surut. Hal ini terlihat dari tidak adanya peserta yang beranjak dari tempat acara hingga presentasi Eep usai. Tingginya antusiasme mereka berlanjut sampai dengan sesi tanya jawab selama 15 menit. Waktu yang diberikan oleh panitia dianggap masih kurang, tapi sayang, *member gathering* kali ini harus diakhiri.

Dengan adanya *gathering* ini, IBI berharap para bankir bisa memetik hikmah yang penting. Praktiknya ke depan, mereka mampu memetakan strategi bisnis yang tepat di tengah kondisi ekonomi dan politik yang terus berkembang. Sehingga, cita-cita IBI untuk melahirkan bankir yang berkompeten, bermartabat, dan berintegritas akan segera terwujud. Ingat, perekonomian bangsa yang kuat berawal dari pelaku ekonomi yang berkualitas, termasuk bankir. ■

BARa Selenggarakan Seminar dan Pelatihan Manajemen Risiko

Manajemen risiko tengah menjadi *tren* dan menjadi bahan pembicaraan hangat di industri perbankan Indonesia. Beberapa seminar dan *workshop* seputar itu pun sering diadakan.

►► MANAJEMEN risiko (*risk management*) semakin hari semakin mendapatkan perhatian yang baik dari pelaku di industri perbankan Indonesia. Bahkan, banyak lembaga, asosiasi, dan *event organizer* yang ingin menyelenggarakan seminar dan *workshop* tentang manajemen risiko.

Besarnya perhatian kalangan, khususnya industri perbankan, terhadap manajemen risiko tidak terlepas dari keinginan Bank Indonesia (BI) yang mengharapkan seluruh karyawan bank tahu bagaimana mengelola manajemen risiko secara benar.

Menyikapi hal itu, Bankers Association for Risk Management (BARa) bekerja sama dengan Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) pun mengadakan seminar dan *workshop* berkaitan dengan manajemen risiko. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 28 dan 29 Juli 2009 di Hotel Grand Kemang, Jakarta, selama dua hari.

Untuk menarik minat masyarakat, dalam hal ini masyarakat perbankan, BARa tidak memungut biaya kepada peserta. Masalah biaya sepenuhnya ditanggung pihak BARa dan Perbanas. Lebih dari 30 bank mengutus perwakilannya mengikuti acara seminar plus *workshop* ini. Mereka umumnya dari bagian yang menangani manajemen risiko karena memang yang diseminarkan berkaitan dengan penerapan manajemen



risiko. Tetapi, ada juga beberapa direktur bank yang mengikuti acara tersebut.

Seminar dan *workshop* yang diadakan BARa dan Perbanas ini merupakan yang kedua kalinya setelah yang pertama diadakan pada Maret 2009. Peserta yang hadir sekitar 110 orang. "Yang cukup menggembarakan pihak panitia, pendaftaran untuk mengikuti kegiatan ini ternyata disambut antusias oleh kalangan perbankan. Dan, pesertanya cukup membludak, bahkan ada yang kami tolak karena terlambat mendaftar," kata Adhiputra Tanoyo, ketua panitia seminar dan *workshop*.

Kegiatan tersebut dibagi dalam dua tahap. Hari pertama berupa seminar yang dibuka oleh Halim Alamsyah, Direktur Bank Indonesia (BI), dengan pembicara Dr. Wimboh Santoso yang juga dari BI. Sementara, hari kedua berupa *workshop* sebagai implementasi dari seminar sebelumnya dengan pembicara Mr. Douglas, praktisi perbankan luar negeri.

Tujuan diadakan seminar dan *workshop* itu sendiri untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan teknis kepada karyawan bank bagaimana

mengkaji kapasitas bank dalam keadaan stres, seperti banyaknya kredit macet dan likuiditas yang susah. "Oleh karena itu, diharapkan mereka bisa menangani permasalahan tersebut dan bagaimana cara mengelolanya," tutur Adhi.

Di dalam seminar tersebut, peserta diberikan pemahaman tentang manajemen risiko berikut teorinya. Sedangkan di *workshop*, peserta diajarkan teknis secara detail dalam mengelola manajemen risiko.

Jika mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI), bentuk implementasi manajemen risiko yang diharuskan adalah sertifikasi dan program pemeliharaan. Dari sisi program pemeliharaan, ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan, seperti *coaching* dari atasan, menghadiri seminar, dan mengikuti *workshop*. "Jadi, kalau karyawan bank ingin menggunakan hal ini sebagai pemenuhan kewajiban *refreshing*, saya rasa Bank Indonesia akan mendukungnya," ujar Adhi.

Adhi berharap, dengan kegiatan tersebut, setiap karyawan bank semakin mampu mengelola bisnis perbankan dengan baik. Salah satu aspeknya adalah mengelola manajemen risiko. ■

Sepakat Turunkan Suku Bunga



IBI dan Perbanas menggelar buka puasa bersama bagi anggotanya akhir Agustus lalu. Pada kesempatan yang sama, komitmen penurunan suku bunga ditandaskan kembali.

►► Untuk mempererat tali silaturahmi anggotanya, di tengah syahdunya suasana Ramadhan, Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) mengadakan buka puasa bersama. Acara itu berlangsung di Ball Room Hotel Kempinski Grand Indonesia pada minggu keempat Agustus. Sigit Pramono, Ketua Umum Perbanas; Agus Martowardojo, Ketua Umum IBI; dan juga Muliaman D.

Hadad, Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI); turut mengangkat suasana.

Acara segera dimulai begitu hadirin usai berbuka dan menunaikan salat Maghrib. Setelah Sigit Pramono memberikan sambutan, giliran Agus Martowardojo menyampaikan pidato dengan gayanya yang khas. Dalam pidatonya, Agus mengajak segenap bankir yang hadir untuk senantiasa bercermin pada spirit patriotisme dan nasionalisme para *funding father* negara ini (Soekarno-Hatta). Semangat hari ulang tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-64 sengaja diusung dalam forum itu.

Menurut Agus, nasionalisme terlihat nyata pada diri Hatta yang bertitel sarjana lulusan Belanda. Sebenarnya, kala itu, dia bisa hidup lebih enak, tapi rupanya tak dilakukannya. Hatta malah memilih berjuang merebut kemerdekaan bangsa, meskipun beberapa kali ia harus hidup dalam pembuangan. Dengan meneladani semangat tokoh besar itu, Agus mengharapakan keluarga besar IBI dan

Perbanas mampu memberikan yang terbaik bagi bangsa. Di antaranya, dengan membantu terciptanya industri perbankan nasional yang sehat.

Dalam acara yang mengangkat tema "Kebijakan BI Terkait dengan API" itu, Muliaman juga menyerukan pentingnya semangat perbaikan dunia perbankan.

Namun demikian, dia lebih menekankan pentingnya perubahan perbankan nasional dengan mengagendakan revisi Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Sementara itu, Agus menilai, iklim ekonomi Indonesia saat ini cukup kondusif. Situasi ini dipengaruhi suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum yang berjalan dengan baik dan lancar. Sebagai indikator, angka inflasi sampai dengan Juli 2009 hanya 0,6% dan secara *year on year* (YoY), inflasi mencapai 2,7%. Dengan pencapaian tersebut, banyak pihak memperkirakan inflasi akan berada di level 4% pengujung tahun ini.

Artinya, itu sesuai dengan target pemerintah (inflasi di bawah 5%). Prestasi yang dapat memicu terciptanya perekonomian yang lebih baik dan stabil ke depan.

Pada kesempatan yang sama, Agus juga menandaskan kembali komitmen 14 bank (90% dari pangsa pasar perbankan di Tanah Air) untuk menurunkan suku bunga depositonya. Ketua Umum IBI ini berharap segenap bankir menyambut baik inisiatif tersebut. "Tiga bulan ke depan diharap suku bunga akan makin turun. Sehingga, itu akan berimbas pada membaiknya perekonomian nasional," jelasnya.

Selain penurunan suku bunga, dalam upaya memapankan sistem perekonomian nasional, Agus mengajak keluarga besar IBI dan Perbanas untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi internal mereka. Ibarat permata yang belum diasah, kalangan bankir juga perlu mengikuti sertifikasi. Di sisi lain, lembaga yang melakukan sertifikasi harus berada di bawah naungan IBI. ■



Member Gathering Pasca-Pilpres 2009

PADA 29 Juli 2009, Ikatan Bankir Indonesia (IBI) kembali menggelar *member gathering*. Bank Negara Indonesia (BNI) bertindak sebagai tuan rumah dalam acara yang dihadiri segenap pengurus dan anggota IBI tersebut. Ini adalah *member gathering* ketiga yang diselenggarakan IBI sepanjang 2009. Dalam acara ini, Eep Saefullah Fatah, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), mempresentasikan makalah bertajuk "Ekonomi Politik Indonesia Selepas Pemilihan Umum (Pemilu) 2009". Paparan Eep ini masih seiring dengan nuansa politik yang dirasakan bangsa Indonesia. Maklum, 8 Juli lalu, bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden.





Seminar dan Pelatihan Risk Management

PERHIMPUNAN Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) dan Banker Association for Risk Management (BARa) menyelenggarakan Risk Forum 2009 di Hotel Grand Kemang, Jakarta, pada 28 dan 29 Juli 2009. Acara yang dikemas dalam bentuk seminar dan pelatihan ini bertajuk "Seminar & Workshop on Stress Testing". Acara ini diikuti 110 pelaku bisnis perbankan yang mewakili 30 institusi perbankan. Sebagian besar peserta adalah mereka yang bergelut di bidang manajemen risiko (*risk management*). Selama pelatihan, peserta tidak dibebani biaya apa pun.





Buka Puasa Bersama IBI dan Perbanas

PADA 27 Agustus 2009, Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) menggelar acara buka puasa bersama di Hotel Kempinski, Grand Indonesia, Jakarta. Acara ini dihadiri Agus Martowardojo, Ketua IBI; Sigit Pramono, Ketua Perbanas; serta segenap pengurus dan anggota IBI dan Perbanas. Di sela-sela acara ini, Muliaman D. Hadad, Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI), menyampaikan makalahnya tentang kebijakan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang pernah digulirkan BI pada 2004.





Fenomena Pemilu, Peluang bagi Dunia Usaha

Eep Saefullah Fatah

▶▶ TIDAK jauh berbeda dengan negara lain, Indonesia selama ini disibukkan dengan agenda pemilihan umum (Pemilu). Sedikitnya 503 pemilu terselenggara dalam rentang waktu lima tahun, terdiri atas 1 kali pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres), 4 kali pemilu legislatif, plus 32 pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Belum lagi, 466 kali pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.

Momen pelaksanaan pemilu sontak membuat seluruh penjuror negeri bergairah. Terlebih, dengan terselenggaranya pemilihan kepala daerah (pilkada) baru karena pada akhir 2008, terbentuk 12 kabupaten/kota hasil pemekaran. Ajang pemilu akan makin fantastis ketika ditambah dengan 65.260 pemilihan kepala desa (pilkades).

Dalam statistik sederhana, di Indonesia, setiap minggu terjadi dua kali pemilu. Bak puasa sunah Senin-Kamis di kalangan umat muslim. Kalau data pilkades diintegrasikan juga ke dalamnya, data statistik bakal menjadi lebih dramatis. Bagaimana tidak, dalam kurun lima tahun, di Indonesia terjadi 36 pemilu setiap hari.

Dari fenomena pesta demokrasi itu, setidaknya, ada tiga hal menarik yang patut Anda mengerti. Satu, dalam rentang lima tahun, ada 503 pemilu di Indonesia. Dengan kata lain, lebih dari 100 pemilu tiap tahun atau lebih dari delapan pemilu setiap bulan atau dua kali pemilu setiap minggu. Dua, jika pilkades ikut dihitung, ada 36 pemilu setiap hari. Tiga, seorang warga negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki hak pilih diperkirakan akan menconteng 10-11 kali tiap lima tahun hidupnya.

Mengingat seringnya pelaksanaan pemilu, kalau bangsa ini terjebak pada demokrasi yang berat di ongkos, di beban, di kesibukan atau prosedurnya, berarti demokrasi di Indonesia belum efisien. Efisiensi demokrasi tercapai manakala biaya yang dikeluarkan sepadan dengan yang kita raih. Beban yang kita tanggung juga sepadan dengan

kenikmatan yang kita reguk.

Lalu, seperti apa karakteristik pemilih kita pada Pemilu 2009? Pemilih muda tampaknya mendominasi Pemilu 2009. Pemilih berusia 17 tahun hingga 39 tahun mencapai 50,6%, selebihnya 49,4% pemilih usia di atas 40 tahun. Partisipasi warga relatif tinggi, terbukti dari data bahwa 72% WNI menggunakan hak pilih mereka dalam pilpres lalu. Pembaruan daftar pemilih tetap (DPT) juga cukup berpengaruh. Terlebih, dengan diperbolehkannya penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) atau *passport* untuk warga negara yang sedang di luar negeri.

Kendati begitu, tidak sedikit pula yang memilih menjadi golongan putih (golput). Pada Pemilu 2009, sedikitnya 66 juta orang yang tidak memilih atau memilih tapi tidak sah. Itu artinya, 39,15% golput dalam pilpres menurun jadi 55 juta orang dengan persentase 31,11%.

Karena faktor kerumitan menconteng saat pemilu legislatif, jumlah golput meningkat. Banyaknya calon wakil rakyat yang dipilih malah membingungkan masyarakat. Suara tidak sah yang mencapai 14,2% menjadi rekor selama pemilu reformasi. Sementara itu, angka golput berhasil turun 5,06% dalam pilpres karena lebih sederhananya model surat suara, yaitu hanya dengan menampilkan gambar tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), di tengah bursa calon legislatif (caleg) 2009, hanya 1,1% caleg yang berhasil meraih kursi. Kompetisi yang luar biasa sering kali membuat kandidat stres. Sebanyak 11.255 caleg di tingkat pusat atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memperebutkan 560 kursi. Dari jumlah itu, hanya 5% yang berhasil dan sisanya (95% atau 10.665 caleg) gagal.

Di tengah perjalanan, komposisi 560 terpilih mengalami perubahan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan. Di sisi lain, adanya keputusan Mahkamah Agung (MA) menyebabkan

orang yang tadinya tidak terpilih menjadi terpilih ataupun sebaliknya.

Kegagalan meraih kursi legislatif nasional merata di 33 provinsi dengan situasi relatif sama. Jika dilihat dari persentasenya, mereka yang sukses menduduki kursi wakil rakyat kurang dari 5% atau 95% mengalami kegagalan. Berdasarkan contoh kasus yang dimuat dalam *Bali Post* edisi April 2009, dari total 5.065 caleg tingkat pusat dan daerah, hanya 399 atau setara dengan 7,9% yang terpilih, sedangkan selebihnya 4.666 atau 92,1% caleg gagal.

Kisah tragis pun mewarnai nasib sejumlah caleg yang gagal. *Suara Pembaharuan* edisi April 2009 menyebutkan, dari 1.606.537 caleg gagal di seluruh Indonesia, 191.280 orang mengalami gangguan jiwa dengan beragam level. Sebanyak 180.000 orang mengalami gangguan jiwa lazim dengan gejala depresi, kecemasan, sulit tidur (insomnia), gangguan makan, dan keluhan fisik. Tak kurang dari 4.800 orang mengalami gangguan jiwa berat dengan gejala gangguan pada perilaku, keinginan bunuh diri, serta penyalahgunaan zat adiktif dan alkohol. Bahkan, 480 caleg yang terguncang jiwanya memerlukan perawatan di rumah sakit jiwa (RSJ).

Memang, banyak caleg yang bersedih dan langsung menjilat kembali janji manisnya. Tapi, ada kisah mengharukan dari Lampung. Dua caleg dari daerah ini tetap memenuhi janjinya, meski kalah. Mereka mengeluarkan dana Rp1,36 miliar dan memberikan hadiah sapi kepada dua kecamatan

Indonesia (setidaknya lima tahun mendatang). Tak terkecuali, mereka yang datang dari dunia perbankan. Dalam acara buka bersama yang digelar Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Persatuan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) pada akhir Agustus lalu, Agus Martowardojo, Ketua Umum IBI, mengakui iklim ekonomi Indonesia kini cukup kondusif sebagai pengaruh positif suksesnya pemilu.

Dari serangkaian proses demokrasi itu, harus disadari bahwa pemilu merupakan sebuah sarana untuk melangkah pada tahap berikutnya. Di atas



Mengingat seringnya pelaksanaan pemilu, kalau bangsa ini terjebak pada demokrasi yang berat di ongkos, di beban, di kesibukan atau prosedurnya, berarti demokrasi di Indonesia belum efisien. Efisiensi demokrasi tercapai manakala biaya yang dikeluarkan sepadan dengan yang kita raih. Beban yang kita tanggung juga sepadan dengan kenikmatan yang kita reguk.

sebagai modal usaha baru masyarakat setempat. Ternyata, sebelum dua caleg ini berkampanye, mereka telah mengalang dana dengan pihak ketiga, sehingga tersedia dana untuk membeli sapi.

Kini, saatnya menarik napas lega. Bangsa Indonesia telah menyelesaikan pesta demokrasi berupa pemilu legislatif dan pilpres. Meski sempat mengalami sejumlah kendala, banyak kalangan menilai pilpres yang memutuskan pasangan SBY-Boediono sebagai presiden dan wakil presiden terpilih berjalan dengan baik.

Suksesnya pelaksanaan pemilu membuat banyak pihak optimistis terhadap prospek masa depan

kesuksesan terbentuknya jajaran legislatif dan eksekutif yang baru dari hasil pemilu akan dibangun setumpuk harapan. Demi kelangsungan perekonomian bangsa, peran aktif para bankir dan industri perbankan sangat diperlukan. Langkah konkret mereka juga ditunggu segenap komponen negeri ini. Menciptakan peluang bisnis yang lebih luas serta memantapkan pertumbuhan ekonomi bangsa. ■

Tulisan ini merupakan hasil rangkuman dari makalah Eep Saefullah Fatah, pengamat politik, yang disampaikan pada pertemuan anggota Ikatan Bankir Indonesia di Wisma BNI 46, Jakarta, akhir Juli 2009.



Lebih Akrab, Lebih Hangat dengan Website Baru

IBI telah memperbarui *website*-nya, dari www.bankir-indonesia.org menjadi ikatanbankir.com. Apa saja yang baru dari *website* yang diluncurkan Agustus lalu itu? Isti Witjaksana

▶▶ PATUT disayangkan jika masih ada orang yang gagap teknologi di zaman serbadigital seperti sekarang. Padahal, dengan perkembangan teknologi yang kian pesat, hal yang tak mungkin bisa jadi mungkin karena saluran informasi kini makin banyak. Salah satunya lewat dunia

maya, seperti internet. Melalui internet, kita bisa mendapatkan informasi secepat kilat dari *website-website* yang tersedia.

Secara terminologi, *website* adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang biasanya terangkum dalam sebuah domain atau subdomain. Di internet, tempatnya ada dalam *world wide web (www)*. *Website* ditemukan Sir Timothy John "Tim" Berners-Lee, pria kelahiran London, Inggris, 54 tahun lalu. *Website* yang tersambung dengan jaringan pertama kali muncul pada 1991.

Website sendiri memiliki fungsi beragam, tergantung dari tujuan dan jenis *website* yang dibangun. Tapi, secara garis besar, *website* berfungsi sebagai media promosi, media pemasaran, media informasi, media pendidikan, dan media komunikasi. Tak heran, keberadaan

website bagi sebuah organisasi ataupun perusahaan kini menjadi penting.

Ikatan Bankir Indonesia (IBI), organisasi para bankir yang berasal dari peleburan Bankers Club dan Institut Bankir Indonesia (IBI), juga memanfaatkan teknologi *website* dalam mengembangkan organisasinya. Selain sebagai identitas diri, *website* IBI berperan sebagai media yang menyajikan pelbagai informasi yang dibutuhkan, khususnya oleh para anggota IBI.

Website IBI lahir pada 2006. Tapi, sempat mengalami kemandekan lantaran *website* IBI belum maksimal menjalankan perannya sebagai sumber informasi bagi para anggota IBI. Selain itu, tampilan *website* lama tampak kurang berwarna. Padahal, menurut Direktur Eksekutif IBI, Martono Soeprapto, tampilan *website* sebuah organisasi mewakili kesan

pertama organisasi tersebut.

Karena itu, para pengurus IBI merasa perlu memperbarui kembali *website* yang sudah ada. Akhir Juli 2009, pengurus IBI yang diwakili Martono Soeprapto dan Ketua Bidang Komunikasi IBI, Winny E. Hasan, menggelar sebuah diskusi tertutup di Kantor Pusat Bank DKI Jakarta.

Diskusi yang memakan waktu sekitar dua jam itu berlangsung santai, meski tanpa menanggalkan keseriusan. Agenda pokoknya adalah presentasi desain baru *website* IBI. Vendor yang terpilih memberikan tiga alternatif desain baru yang lebih dinamis dan masing-masing desain memiliki nuansa seni yang berbeda.

Kelebihan *website* baru ini, antara lain pemuatan *database* anggota IBI yang lebih lengkap daripada *website* sebelumnya. Selain itu, ada penambahan jumlah memori menjadi 50 *gygabyte hosting*, sehingga dapat memuat artikel lebih banyak. Pemuatan artikel, khususnya yang berkaitan dengan pemberitaan mengenai IBI, penting guna memperkenalkan IBI melalui *website*. "Terus terang, sekarang ini 'kan masih banyak orang yang belum mengenal IBI. Melalui *website*, kami akan mensosialisasikan apa itu IBI," jelas Martono.

Dengan adanya penambahan jumlah kapasitas, IBI pun dapat memasukkan majalah internalnya, yakni *Media Bankir*,



Martono Soeprapto; menjadi acuan bankir

ke dalam *website* ini. Hal ini akan mempermudah para anggota yang belum mendapatkan *hardcopy*-nya untuk tetap dapat membaca majalah internal tersebut melalui *website*. Di luar fasilitas-fasilitas baru tersebut, fasilitas yang sudah ada, seperti pendaftaran anggota secara *online*, masih tetap tersedia.

Setelah melalui presentasi dan tanya jawab, pilihan jatuh pada desain *website* pertama yang memang memiliki desain navigasi paling mudah. Winny sendiri beralasan, pemilihan warna pada desain pertama cukup tegas dan menggambarkan karakter IBI.

Kendati begitu, masih ada hal yang,

menurut Winny, perlu diperbaiki. Misalnya, navigasi yang berbahasa Inggris perlu diubah menjadi bahasa Indonesia. Selain itu, Winny menyarankan, perlu dibuatkan satu halaman khusus yang berisi tentang berita-berita terkini terkait dengan IBI yang sifatnya insidental.

Kini, *website* IBI hadir kembali dengan nama baru, yakni *ikatanbankir.com*. Langkah selanjutnya adalah memublikasikan, khususnya kepada para anggota IBI. Martono mengaku, *website* ini baru diperkenalkan dari mulut ke mulut di sela-sela pertemuan rutin IBI, seperti *gathering* dan buka puasa bersama pada Agustus lalu.

Selain dengan cara tersebut, Martono berharap, *Media Bankir* sebagai media komunikasi cetak IBI bisa ikut memublikasikannya. "Jadi, saling timbal balik. Media internal memperkenalkan *website* baru dan *website* memperkenalkan media internal," ujarnya. Segudang harapan disematkan pada *website* baru IBI. Salah satunya, *website* ini dapat menjadi acuan para bankir dalam mencari informasi, terutama yang berkaitan dengan perbankan. Jadi, jika dulu hanya sekadar wadah komunikasi bagi para anggotanya, kini fungsi tersebut bertambah. "Keberhasilan tujuan dari *website* ini nanti bisa kita lihat dari jumlah kunjungan," jelas Martono menutup pembicaraan. ■

BANK JABAR BANTEN

Gratis tarik tunai dimana saja
Belanja tinggal gesek
Transfer antar bank
Bayar tagihan listrik

Didukung lebih dari 60.000 EDC & 17.000 jaringan ATM berlogo :

ATM BANGSAWA, ATM BERSAMA, ATM BCA, PRIMA, DEBIT BCA, PRIMA DEBIT

ATMDEBIT

AYO ke BANK

Peter B. Stok
Komisaris Utama BNI

Matang Karena Pengalaman



KEPUTUSAN Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Negara Indonesia (BNI) yang digelar di Hotel Shangri-La, Jakarta, akhir Mei lalu, mengangkat Peter Benyamin Stok sebagai Komisaris Utama BNI. Bagi bankir senior yang mengenyam pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, pada 1989, ini, dunia perbankan bukanlah hal asing.

Pria kelahiran Jakarta, 21 Desember 1949, ini mengawali karier di dunia perbankan pada 1975 sebagai *executive training* di Citibank. Karier di dunia perbankan terus ditekuninya. Pada 1976-1978, dia pernah bergabung dengan Bank Niaga sebagai *account officer*. Masih di bank yang sama, dia juga sempat menduduki posisi Wakil Pemimpin Bank Niaga Cabang Bandung, Jawa Barat, pada 1979.

Dua tahun kemudian (1981), posisi Pemimpin Bank Niaga Bandung digenggamnya. Posisi tersebut dijalani hingga 1985. Selama 1985-1987, tanggung jawab yang lebih besar diemban bungsu dari enam bersaudara ini, yakni sebagai orang nomor satu di Bank Niaga Wilayah II Jawa Timur.

Empat tahun berikutnya (1987-1991), Peter B. Stok menjabat Pemimpin Bank Niaga Wilayah I Jakarta. Posisi Direktur Regional Banking Bank Niaga pun pernah dijalani selama tiga tahun (1991-1994). Sementara, pada 1994 hingga September 1997, dia menjabat Wakil Presiden Direktur Bank Niaga. Posisi Wakil Presiden Direktur Bank Pelita pun pernah digenggamnya, yakni pada Oktober 1997-Januari 1998.

Peter B. Stok juga pernah menjabat Direktur Utama PT Aerowisata selama Juli hingga Desember 1998. Itu adalah satu-satunya karier Peter di luar dunia perbankan.

an. Namun, Desember 1998 hingga 1999, suami Arita Kistanti ini kembali lagi ke dunia perbankan. Dia dipercaya menjabat Direktur Utama Bank Dagang Negara (BDN) yang kala itu tengah dalam proses merger menjadi Bank Mandiri. Agustus 1999, Peter pun ditunjuk menjadi *executive vice president* bank hasil merger ini. Di usianya yang ke-60 tahun, Peter tak kuasa menolak pinangan BNI untuk menduduki posisi komisaris utama.

Arviyan Arifin
Direktur Utama
Bank Muamalat Indonesia

Bekerja Lebih Optimal



RAPAT Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang digelar di Hotel Bidakara, akhir Juli lalu, menunjuk Arviyan Arifin sebagai Direktur Utama BMI, menggantikan A. Riawan Amin yang telah memimpin bank ini selama dua periode. Pria kelahiran Padang, Sumatra Barat, 45 tahun lalu, ini mengawali karier di dunia perbankan sebagai *executive trainee* di Bank Duta pada 1989. Arviyan juga pernah berlabuh di salah satu cabang Bank Duta di Surabaya pada 1991.

Alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) ini bergabung dengan Bank Muamalat pada 1991 sebagai *department head commercial banking*. Arviyan juga pernah menjabat *assistant vice president-credit and marketing* dan *vice president-marketing group head* hingga 1995. Berkat dedikasinya, dia pernah meraih penghargaan sebagai karyawan terbaik.

Dalam konferensi pers pengenalan jajaran direksi baru di Hotel Shangri-La, akhir Juli lalu, Arviyan mengharapkan segenap jajarannya mampu bekerja lebih optimal.

Kemas M. Arief
Direktur Utama Bank Agroniaga

Melaju Berbekal Pengalaman



RAPAT Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Agroniaga (Bank Agro), pertengahan Maret lalu, akhirnya memutuskan Kemas M. Arief sebagai Direktur Utama Bank Agro. Alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) ini sebelumnya menjabat direktur pemasaran sejak Mei 2007.

Kemas mengawali karier di perbankan sebagai *trainee* di Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada 1978. Peraih *master of business administration (M.B.A.)* dari Drexel University Philadelphia, USA, ini kemudian dipercaya menjabat Pemimpin Cabang BRI Surabaya Tanjung Perak pada 1989 dan Wakil Kepala Urusan Internasional BRI pada 1991.

Pria kelahiran Palembang pada 1951 ini juga pernah menjabat *Vice President Director* Sanwa BRI Finance pada 1993 dan menjabat *General Manager* BRI New York pada 1994.

Berbagai pelatihan dan kursus dari dalam dan luar negeri telah diikutinya, seperti Harvard Summer School (1985), Perdagangan Luar Negeri (1989), International Banking (1991), Orientasi Kegiatan BRI New York (1991), dan Orientasi Kegiatan BRI Finance (1991). Pada 1999, Kemas sempat bergabung dengan Tim Pengelola Bank Nusa Nasional dan menjadi Ketua Tim Pengelola Bank Bali pada 2000.

Dengan segudang pengalaman yang dimilikinya, Kemas diharapkan mampu memberikan sumbangsih dan merealisasikan visi Bank Agro menjadi bank tepercaya dan terbaik bagi pengembangan industri agrobisnis nasional. ■



ASURANSI JASINDO



*Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan pelanggan serta mitra usaha. Kepercayaan dan dukungan yang kami terima, disertai dengan dedikasi dan budaya kerja untuk selalu memperbaiki diri serta menyajikan yang terbaik, telah mengantarkan **Asuransi Jasindo** meraih penghargaan bergengsi "BISNIS INDONESIA AWARD 2009" sebagai Asuransi Umum Terbaik.*

Call Center : 0-800-1-jasindo/0-800-1-527463 atau 021-79181518



www.jasindo.co.id



B++
Stable Outlook

Asuransi Jasindo mendapat rating untuk Finansial Strength Ability berupa B++ (Good) dengan outlook yang stabil.

KANTOR PUSAT

Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 61 Jakarta 12780
PO BOX. 4127 Kebayoran
Telp. : (021) 7994508, 7987908 Fax. : 7971015, 7995364
Homepage : www.jasindo.co.id
Email : jasindo@jasindo.co.id, jasindo@jasindonet.com



Redefinisi API Pasca Krisis

Muliaman D. Hadad

▶▶ Krisis moneter yang terjadi pada 1997-1998, meluluh-lantakkan banyak hal. Kala itu perbankan nasional baru saja melewati masa-masa pemulihan, dimana aset perbankan dilimpahkan kepada Badan Penyelamatan Perbankan Nasional (BPPN) dan *Loan Deposit Ratio* (LDR) perbankan berada di bawah 40%.

Lalu pada 2004, dilandaskan kepada begitu banyaknya persoalan yang dihadapi oleh Indonesia dirumuskanlah Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Perumusan API ini bertujuan untuk memberikan penghargaan terhadap krisis moneter 10 tahun yang lalu, karena krisis tersebut mengeluarkan biaya sangat mahal dan memakan waktu yang cukup panjang. Sehingga saat itu muncullah pemikiran untuk membuat suatu karya, agar pengorbanan-pengorbanan saat krisis tadi tidak kembali percuma layaknya asap.

Sekarang, kondisi perbankan sudah menunjukkan angka yang baik, salah satunya karena sudah direkap, kemudian juga rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sudah kembali normal. Namun begitu, isu yang kala itu didiskusikan tidak berhenti hanya sampai restrukturisasi keuangan. Restrukturisasi keuangan ini harus bersifat berkesinambungan, misalnya kepada pendidikan, kesejahteraan, dan lain sebagainya, yang berpijak pada merestrukturisasi aspek operasional divisi perbankan dengan dukungan aspek-aspek operasional yang memadai. Diantara semua aspek yang ada kala itu, pilihan terbanyak jatuh kepada *operational restructuring* dan intermediasi, karena *Non Performing Loan* (NPL) pada saat itu rendah sekali.

Jika ditengok lagi ke belakang, Indonesia ternyata sudah melalui proses panjang dan seiring dengan perkembangannya Indonesia bisa dikatakan berhasil. Banyak isu-isu perbankan yang sudah terjawab, misalnya isu mengenai intermediasi dan LDR, yang sebagian sudah terjawab. Sekarang, Bank Indonesia (BI) sudah punya energi lebih untuk memikirkan hal lain, seperti *going abroad*, yaitu permintaan Bank

Mandiri untuk membuka cabang di luar negeri. Terkait hal ini, BI memikirkan kebijakan apa yang kira-kira kondusif dengan *going abroad* tersebut.

Jika dibandingkan dengan tetangga, performa Indonesia jauh lebih bagus. Sehingga kalau membicarakan industri perbankan rasanya seperti di atas angin. Istimahnya, perbankan Indonesia sudah naik kelas, sebab pada lima tahun terakhir, perbankan Indonesia betul-betul merangkak. Karena sudah naik kelas itu lah, maka perbankan memerlukan simulasi-stimulasi baru dan ini harus menjadi pemikiran kita bersama.

Begitu juga dengan API yang sekarang hampir berusia lima tahun, dimana selama itu banyak perkembangan yang telah terjadi, jadi sudah sepatutnya API diredifinisi. Redefinisi tersebut merujuk kepada apa yang menjadi tantangan perbankan nasional ke depan dan hal apa saja yang melandasi kebijakan-kebijakan tersebut. Maka dari itu, redefinisi API dapat diarahkan kepada tiga hal besar, satu, secara garis besar terdiri atas program-program peningkatan ketahanan dan daya saing perbankan yang masih lemah, peningkatan efisiensi perbankan, dan evaluasi pengaturan kepemilikan bank.

Dua, secara garis besar terdiri atas program-program peningkatan kualitas pengawasan bank, dan peningkatan perlindungan nasabah. Terakhir yaitu, secara garis besar terdiri atas peningkatan daya saing bank perkreditan rakyat (BPR) dalam pembiayaan mikro, peningkatan efisiensi infrastruktur teknologi informasi (TI) perbankan yang belum efisien, serta mendorong industri perbankan nasional memiliki *database* nasional risiko operasional. Ini yang akan menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Akan kemanakah industri perbankan nasional dalam waktu lima tahun ke depan, itu menjadi tugas kita untuk didiskusikan.

Selain itu diskusi juga perlu dilakukan karena masing-masing bank memiliki persoalan yang berbeda-beda. Sekarang ini ada bank yang sudah jauh membangun suatu kebiasaan-kebiasaan baru, namun

ada juga yang baru mulai membangun. Contohnya mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 50 dan 55, ada bank yang sudah siap, tapi ada juga yang belum. Maka dari itu, sebelum melangkah, BI perlu masukkan dari para bankir.

Kini, ketika industri perbankan sudah naik kelas dan energi yang dimilikinya cukup besar, maka ini membutuhkan penyaluran yang tepat. Agar tepat sasaran, maka diperlukan suatu landasan. Begitu juga dengan kebijakan, sebelum kebijakan tersebut dibuat, maka diperlukan studi kasus sebagai landasan untuk membangunnya.

Hal tersebut juga menjadi topik utama dari pertemuan para pemimpin dunia yang tergabung di G20. Yang perlu kita antisipasi disini bagaimana respons dunia terhadap persoalan-persoalan yang ada. Dalam pertemuan sebelumnya, masing-masing peserta diberi mandat yang berisi seruan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat ditempuh secara global. Dalam pertemuan lanjutan pada bulan September, negara peserta membuat kesepakatan untuk memperketat permodalan lembaga keuangan. Salah satu lembaga keuangan yang menjadi sorotan dan wajib meningkatkan modal adalah perbankan. Selain itu, pertemuan tersebut mewajibkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa melakukan pembatasan gaji terhadap bankir

Nuansa yang kental kentara di pertemuan tersebut adalah, keinginan untuk memperketat regulasi. Keinginan tersebut terasa masih sangat kuat, terutama di negara-negara berkembang, jadi arahnya belum pada upaya pelonggaran regulasi. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas bahwa bank wajib menerapkan sistem modal tambahan alias *buffer* di atas syarat minimum atau *countercyclical*. Naik turunnya sistem modal tambahan ini akan mengikuti kondisi perekonomian. Artinya, bank harus menambah CAR mereka sesuai dengan kondisi ekonomi.

Selain kebijakan-kebijakan di atas, pertemuan G 20 juga menghasilkan sebuah komite yang dinamakan *Standing Comitee*. Komite ini terdiri dari tiga bagian dan diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada negara-negara anggota G 20. Yang pertama adalah *standing comitee* yang terkait dengan *Early Warning Exercises* atau latihan yang berhubungan peringatan dini. Negara-negara G 20 secara kolektif merasa perlu adanya *global warning*. Kita perlu bertemu dengan *stress test* dengan model standar, sehingga dapat melakukan latihan-latihan sedini mungkin dan persoalan-persoalan krisis ke depan bisa segera terdeteksi.

Standing comitee kedua adalah yang terkait dengan *regulatory and supervising coordination*. Tugas dari *standing comitee* ini adalah melakukan kordinasi,

Kini, ketika industri perbankan sudah naik kelas dan energi yang dimilikinya cukup besar, maka ini membutuhkan penyaluran yang tepat. Agar tepat sasaran, maka diperlukan suatu landasan. Begitu juga dengan kebijakan, sebelum kebijakan tersebut dibuat, maka diperlukan studi kasus sebagai landasan untuk membangunnya.

misalnya antara *host* dan *home supervisor*. Contohnya Citibank. Bank ini merupakan bank global, dimana di Amerika Serikat (AS) adalah *home*-nya dan di Indonesia adalah *host*-nya.

Contoh lainnya, Indonesia dan Cina akan menandatangani sebuah *memorandum of understanding* (MOU) untuk memayungi perbankan dua negara ini. MOU yang bersifat bilateral seperti itu diperlukan karena yang bersifat global belum tertangani. Hal ini menjadi penting, untuk meminimalisir risiko yang muncul. Sehingga kalau ada perbankan di Indonesia yang mau *going global*, maka akan lebih mudah jika sudah dipayungi oleh kesepakatan. Dalam praktiknya, kesepakatan bilateral itu memunculkan istilah yang sangat populer di kalangan regulator, yaitu, *supervisory college* (semacam tukar-menukar pengawasan).

Pada waktunya, kita semua harus dapat berbicara jujur dan terbuka, terutama kepada peraturan yang terasa memang semakin sulit karena mau tidak mau persaingan akan semakin ketat dan itu tidak dapat dipungkiri. Termasuk untuk mendapatkan sumber daya manusia yang bagus. Selain itu juga Belanja teknologi informasi (TI) juga tidak murah, artinya ini harus dibicarakan secara terbuka. Ini bukan masalah suka atau tidak suka., nanti pada waktunya, ketika para nasabah sudah semakin pandai, maka mereka akan meminta pelayanan yang lebih berkualitas. ▣

Tulisan ini merupakan hasil rangkuman dari presentasi Muliaman D. Hadad, Deputy Gubernur Bank Indonesia, yang disampaikan pada acara Buka Bersama IBI dan Perbanas di Hotel Kempinski, Grand Indonesia, Jakarta, akhir Agustus 2009.

Kemerdekaan dan Semangat Membangun Bangsa

►► BERTEPATAN dengan suasana ulang tahun kemerdekaan yang ke-64 Republik Indonesia, bangsa Indonesia perlahan-lahan mampu keluar dari krisis multidimensi yang melanda dunia. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari semangat bekerja keras dan jiwa membangun yang tertanam di dalam jiwa raga rakyat Indonesia. Dengan motivasi semangat membangun, akhirnya negara ini bisa terbebas dari krisis yang berkepanjangan.

"Kemerdekaan dan semangat membangun" menjadi dua hal penting saat bangsa Indonesia ingin lepas dari penjajahan. Pada masa perjuangan dulu, kalimat tersebut digunakan untuk memotivasi semua elemen masyarakat Indonesia untuk membentuk sebuah negara kesatuan hingga akhirnya kemerdekaan Indonesia terwujud pada 17 Agustus 1945.

Perlu diingat kembali, kemerdekaan Indonesia diraih dengan pengorbanan jiwa, raga, bahkan nyawa oleh para pahlawan bangsa. Dahulu, para pejuang berkorban untuk memerdekakan bangsa. Kini, tugas kita adalah menjaganya dan membangun bangsa ini dari "tidur" kemiskinan, kebodohan, korupsi, dan ketidakadilan.

Pembangunan negara dan bangsa untuk mencapai sukses besar juga memerlukan faktor kepahlawanan yang tidak kalah artinya dari kepahlawanan di masa perjuangan kemerdekaan dulu. Untuk itu, seluruh komponen bangsa seyogianya tergerak hati nuraninya, menunjukkan perbuatan kepahlawanannya di bidang-bidang pekerjaan yang mereka geluti.

Apalagi, ketika bangsa ini mengha-

dapi krisis moneter yang kemudian menimbulkan berbagai krisis lainnya, sikap kepahlawanan makin terasa pentingnya bagi bangsa Indonesia. Dengan kata lain, kepahlawanan pascakemerdekaan yang kini harus tetap dijaga adalah semangat membangun bangsa.

Kini, Indonesia sudah mencapai usia 64 tahun. Semangat kemerdekaan



harus tetap menyala dari seluruh komponen bangsa ini. Kita harus berjalan bergandengan satu sama lain dengan semangat membangun. Semangat membangun dapat diwujudkan dengan mencetak sebanyak-banyaknya prestasi di tingkat nasional maupun internasional.

Sudah sepatutnya bangsa Indonesia menyambut kemerdekaan dengan semangat membangun perekonomian menjadi lebih baik lagi. Pemerintahan baru periode 2009-2014 yang diharapkan akan lebih baik daripada yang lalu telah kita masuki. Bahkan, telah diawali dengan pencapaian-pencapaian yang membesarkan hati di bidang ekonomi, seperti pertumbuhan perekonomian kita sudah melaju dengan baik. Diperkirakan, pertum-

buhan ekonomi Indonesia akan mencapai 4,3% pada 2009. Selain itu, iklim perekonomian nasional terus menunjukkan perbaikan dan diproyeksikan sampai dengan akhir 2009 perekonomian Indonesia akan terus tumbuh secara *sustainable*.

Tumbuhnya perekonomian Indonesia juga tidak terlepas dari peran serta industri perbankan nasional.

Apalagi, ketika perbankan nasional berhasil melewati dan bahkan mampu menahan dampak gejolak-gejolak dari *subprime mortgage* yang melanda Amerika Serikat. Selain itu, perbankan nasional juga aktif mengucurkan kreditnya untuk pembangunan nasional. Jadi, tidaklah berlebihan jika kita kemudian mengatakan bahwa dalam perekonomian nasional, industri perbankan ikut berperan, termasuk di dalamnya para bankir.

Sebagai salah satu pelaku ekonomi, kalangan bankir diharapkan memiliki semangat yang sama di dalam mengisi kemerdekaan ini, di antaranya semangat membangun. Bukan sebaliknya, menjadi perusak atau koruptor yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Sebagai bankir profesional, semangat membangun perekonomian bangsa bisa diwujudkan dengan memberdayakan perekonomian rakyat, misalnya membantu mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM).

Pada akhirnya, upaya pemberdayaan dan pemihakan kepada rakyat hanya akan berhasil apabila kesempatan partisipasi masyarakat memang dirancang untuk selalu dibuka seluas-luasnya dan seadil-adilnya dalam pengelolaan kegiatan ekonomi. ■

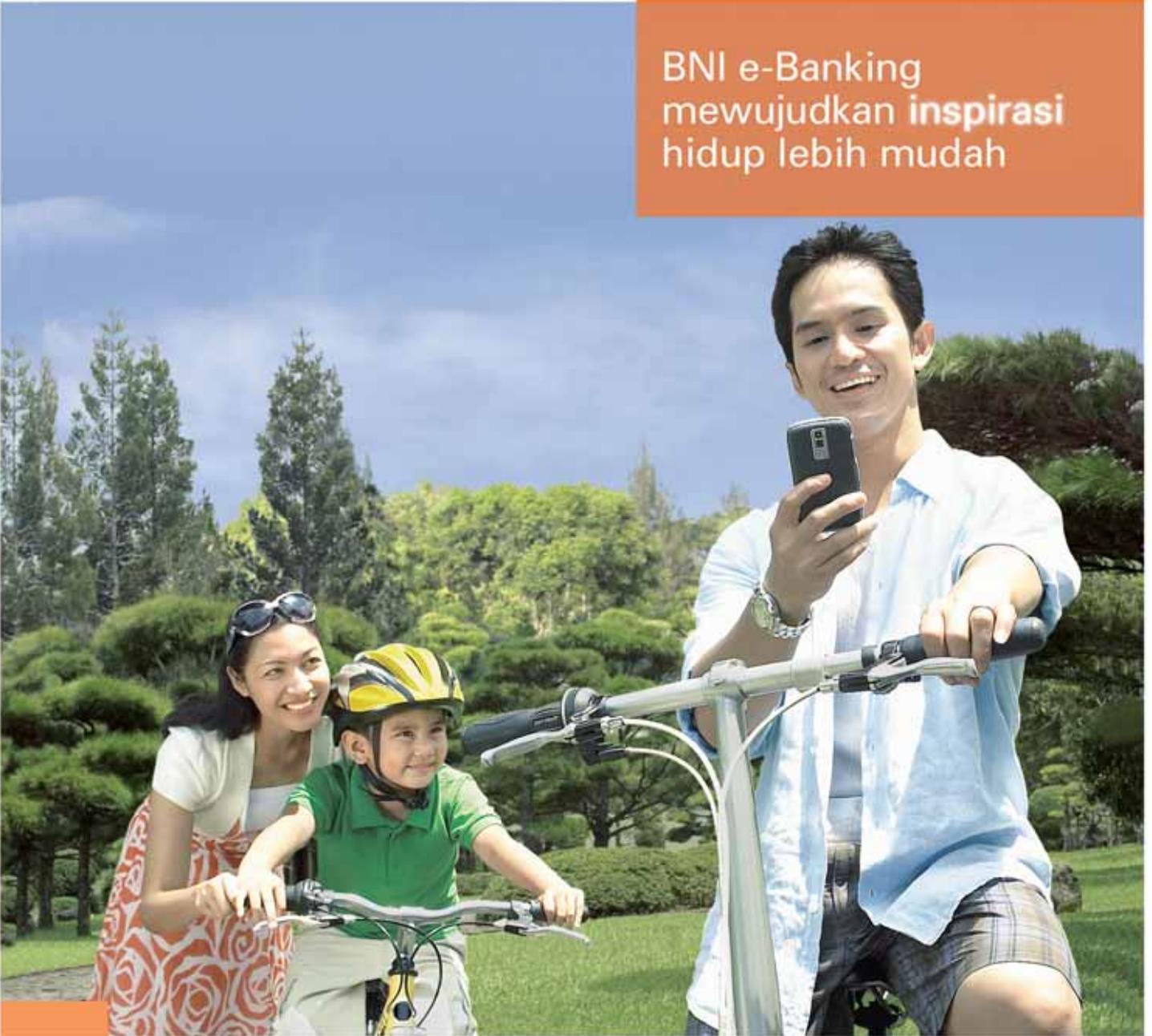


Gadai Emas iB Sumut

*Mengatasi kesulitan dana
dalam waktu cepat
sesuai dengan
Prinsip Syariah*

BNI Inspirasi Kehidupan

BNI e-Banking
mewujudkan **inspirasi**
hidup lebih mudah



www.bni.co.id

BNI e-Banking yang terdiri dari BNI ATM, BNI SMS Banking, BNI Internet Banking siap mewujudkan kehidupan yang lebih berarti bagi keluarga dekat Anda dengan lebih dari 100 jenis transaksi dan layanan perbankan.

- Informasi saldo, tagihan hingga transaksi belanja *online*
- Pembayaran listrik, air, telepon, *handphone*, internet, *Pay TV*, kartu kredit, asuransi, ZIS hingga PBB
- Pembelian isi ulang pulsa hingga tiket pesawat
- Transfer *realtime* ke rekening bank lain dan masih banyak lagi

Segera bergabung di komunitas BNI Taplus dan nikmati fasilitas e-Banking untuk mewujudkan inspirasi Anda.

AYO ke BANK

 **BNI**

Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa